

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) KOTA PALEMBANG

A. Sejarah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sebelum konsep dan praktik keluarga berencana dikenal di Indonesia, keluarga berencana sudah dikenal di Negara-negara Barat sejak zaman dahulu di Indonesia baru dikenal pada tahun 1950-an, sejak tahun 1957 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (*The Family Planning*). Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) didirikan 1966.

Pada tahun 1957 lahirlah Orde Baru yang berorientasi pada pembangun Kesejahteraan Sosial, membentuk organisasi-organisasi di wilayah Jawa Bali dan luar Jawa. Pada tahun 1957, program Keluarga Berencana (KB) mulai mendapat perhatian pemerintah.

Menurut dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1969, Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), suatu lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengembangkan program keluarga berencana bagi penduduk dan memberikan segala macam bantuan, diterima dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah menyimpulkan bahwa masyarakat telah menerima program KB. Pembentukan organisasi BKKBN tingkat I dan II

Daerah dibentuk, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1972, diperjelas status BKKBN sebagai lembaga Negara. Di luar kementerian yang mempunyai kewenangan langsung. Di bawah Presiden. Program KB dikembangkan dan diperluas ke 10 provinsi di luar Jawa dan Bali, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah. Otonomi yang mengubah Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor. 32 Tahun 2004 yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Terbitnya undang-undang ini disusun dengan surat edaran Badan Koordinasi Keluarga Berencana tentang pengalihan BKKBN lembaga kepala Daerah.

Walikota kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Keluarga Berencana dan Pengendalian Keluarga tentang Pembentukan, Kedudukan, Fungsi Pokok, Tugas dan Susunan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (BKBPk). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Palembang resmi menjadi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (BKBPk) Kota Palembang Tahun 2007. Pada Tahun 2008, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (BKBPk) menjadi Badan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (BKBPp). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Perangkat Daerah, harus dibentuk pengaturan kerja. Mulai Peraturan Pemerintah Nomor. 41, struktur organisasi berubah memperluas bidang pemberdayaan perempuan 2016, pada akhir Tahun 2016 nama Badan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (BKBPp) Kota Palembang berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dan tidak biasa disingkat DPPKB Kota Palembang yang kemudian dikeluarkan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor. 56 Tahun 2016 tentang Status Kota Palembang. Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perkotaan, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta tata kerja.¹

B. Profil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dipimpin oleh seorang yang bernama Altur Febriansyah, SH.,M.Si sebagai Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung

¹ Wawancara dengan ibu Lisdanita sebagai Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, DPPKB Kota Palembang pada tanggal 15 April 2024.

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Walikota melalui Sekretaris Daerah.



Gambar 3.1. Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten dan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.²

C. Program dan Kegiatan

Adapun program pemberdayaan peningkatan keluarga sejahtera dan kegiatan DPPKB Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga tahun 2023 mencakup berbagai kegiatan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Berikut adalah beberapa program kerja yang dapat dilakukan oleh DPPKB:

1. Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga Beresiko dan Balita *Stunting*

² Wawancara dengan Ibu Lisdanita sebagai Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Palembang, pada tanggal 15 April 2024.

2. Pemantauan Pendampingan Sasaran Beresiko Anak *Stunting*
3. Audit Kasus *Stunting*
4. Operasi Koordinasi TPPS Tingkat Kota
5. Minilokakarya Kecamatan
6. BKB Kit *Stunting*
7. Dapur Sehat Atasi *Stunting*
8. Pemberian Makanan Tambahan Cegah *Stunting*
9. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi: DPPKB mengadakan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, dan perawatan kesehatan ibu dan anak.
10. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak: DPPKB menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk ibu hamil, meliputi pemeriksaan kehamilan, persalinan yang aman, dan pemberian ASI eksklusif.
11. Program Gizi Balita: DPPKB mengimplemtasikan program gizi untuk balita, termasuk pendampingan gizi, pemberian makanan tambahan, dan monitoring pertumbuhan anak secara rutin.
12. Pemberdayaan Keluarga: DPPKB mengadakan program pemberdayaan keluarga melalui pelatihan keterampilan, pengembangan ekonomi keluarga, dan peningkatan pengetahuan tentang pola asuh yang sehat.
13. Promosi Kesehatan Lingkungan: DPPKB mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik, akses air bersih, dan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
14. Pelayanan Kontrasepsi: DPPKB menyediakan pelayanan kontrasepsi yang aman dan efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan.
15. Kolaborasi dengan Instansi Terkait: DPPKB berkerja sama dengan puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan lembaga sosial untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas program-program kesehatan keluarga.

16. Monitoring dan Evaluasi: DPPKB melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program-program untuk memastikan pencapaian tujuan dan perbaikan berkelanjutan.
17. Pengelolaan Data dan Informasi: DPPKB mengumpulkan dan menganalisis data terkait kesehatan keluarga untuk mendukung perencanaan program yang lebih baik dan keputusan strategis.
18. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Program kerja ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aspek yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan keluarga secara holistik, dengan fokus pada pencegahan stunting, peningkatan gizi, pelayanan kesehatan yang merata, dan pemberdayaan keluarga.

D. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Visi dan Misi DPPKB Kota Palembang sebagai berikut.³

VISI

“Terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas, sehat, sejahtera, dan berkeadilan gender.”

MISI

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga bagi masyarakat.
2. Mengoptimalkan program dan kegiatan pengendalian penduduk yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pentingnya kesejahteraan keluarga.
4. Memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

³ Dokumen Kantor DPPKB Kota Palembang.

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang dilaksanakan.

Visi dan misi ini mencerminkan komitmen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian penduduk yang berkelanjutan, pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, dan perencanaan keluarga yang bijaksana.

E. Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang

Berikut susunan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang Tahun 2023:⁴

1. Kepala Dinas : Altur Febriansyah, S.H.,M.Si
2. Sekretaris Dinas : Drs. Syahirulgama, MM
3. Sub Bagian Umum dan kepegawaian : Ir. Lisdanita
4. Sub Bagian Keuangan : Asmarariani, SE.M, Si
5. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan: Roya Palingga, SE.MM
6. Ketua Bidang Pengendalian Penduduk : Dra. Yuli Rianti, MM
7. Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi :
8. Seksi Pemetaan dan Perkiraan :
9. Seksi Data dan Informasi : Riza Maretha, S.Tr
10. Ketua Bidang Keluarga Berencana : Dra. Sarah, S.H.,M.Hum
11. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
:
12. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga :
13. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana

⁴ Dokumen Kantor DPPKB Kota Palembang

14. Ketua Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
: Drs. Zulramadhan, M.Si
15. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera :
16. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lanjut Usia
: Romlah Nawawi, SKM
17. Seksi Bina Ketahanan Remaja : Mubaroq, S.H.
18. Ketua Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
: Hj. Kapiatul Ahliah, SE.MM
19. Seksi Penyuluhan KIE :
20. Seksi Advokasi dan Penggerakan : Baihaqki, SKM.M,Si
21. Seksi Pendayagunaan PKB, PLKB, dan Institusi Masyarakat Perkotaan
: